

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OLEH SAMSAT WILAYAH MAKASSAR 1 SELATAN

Vivi Yovita

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: herlinasakawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan member check. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sudah efektif dari indikator ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Kurang efektif dari indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan sasaran. Adapun faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu: faktor keuangan, lupa, dan tidak memperhatikan jatuh tempo pajak kendaraan. Sedangkan faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan penertiban, dan sosialisasi.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan.

1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan daerah. Sumber pendapatan daerah terbanyak berasal dari pajak. Berdasarkan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, pendapatan yang tertinggi adalah Pajak Daerah dengan jumlah Rp 3.710.611.599.841.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 10 menyatakan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyatakan, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap kabupaten yang ada di provinsi.

Hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan, kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang berperan sangat penting. Dalam pelaksanaan pemungutannya, SAMSAT melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 25 SAMSAT. Salah satu diantaranya SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan. Ada berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu diantaranya adalah penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan data dari SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan kendaraan terjaring penertiban pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebanyak 2129 unit roda 2 dan 651 unit roda 4. Dapat dilihat masih banyaknya kendaraan yang terjaring penertiban

Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan, baik itu roda dua maupun roda empat. Hal ini menggambarkan kepatuhan wajib pajak masih kurang.

Adapun terkait jumlah pelaksanaan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan di tahun 2019 Januari 0, Februari 2 kali, Maret 2 kali, April 2 kali, Mei 0, Juni 3 kali, Juli 1 kali, Agustus 2 kali, September 0, Oktober 3 kali, November 3 kali, Desember 3 kali.

Dapat dilihat terlaksananya penertiban Pajak Kendaraan Bermotor. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya karena sesuai informasi dari SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan jadwal pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor setiap bulannya 3 kali, tapi hal ini tidak tercantum di SOP Penertiban melainkan target yang dijadikan acuan rutinitas. Dalam pelaksanaannya yang mencapai 3 kali dalam sebulan, hanya pada bulan Juni, Oktober, November dan Desember. Pada bulan yang lainnya tidak mencapai jumlah target yang ditentukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Larasati (2018) yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Pertama adalah

pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Kedua adalah adanya razia kendaraan bermotor. Ketiga adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak (koran).

Penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Nur Wachida Cinitya Lestari (2016) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitiannya faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada kajian yang akan dibahas mengenai efektivitas penertiban pajak kendaraan bermotor. Adapun lokus penelitian ini dilaksanakan SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini **“Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan”**.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung kepatuhan wajib pajak?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT Wilayah Makassar

1 Selatan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung kepatuhan wajib pajak.

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti adanya efek, pengaruh, dan akibat, selain itu efektif juga diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna serta menunjang tujuan. Jadi kata efektif dapat juga diartikan sebagai pengaruh untuk menunjang suatu tujuan.

Menurut Mahmudi dalam Reski Fatmala (2019) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Menurut Makmur (2011:7-9), unsur-unsur efektivitas sebagai berikut

1) Ketepatan Penentuan Waktu

Seperti yang diketahui bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya, tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan

dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan suatu biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3) Ketepatan dalam Pengukuran

Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas merupakan bagian dari efektivitas. Dengan ketepatan ukuran yang sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektifan. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui proses.

5) Ketepatan Berpikir

Kelebihan manusia yang satu dengan yang lainnya sangat bergantung ketepatan berpikirnya, karena dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6) Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu

organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin. Salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

7) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan sebagai pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

b. Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Zulkardi (2019), penertiban berasal dari kata tata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam asas kehidupan sosial.

Pengertian penertiban menurut Retno Widjajanti dalam Zulkardi (2019) adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk

penertiban langsung dan tidak langsung.

Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegak hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau memberi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain: a. Sanksi administratif, b. Sanksi perdata, c. Sanksi pidana.

c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyatakan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

d. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Raya sebagaimana yang ada dalam SK SOP Penertiban PKB UPT MKS 1 (2018), merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Satuan Lalu Lintas untuk mendamping petugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pemilik/menguasai kendaraan bermotor membayar pajaknya tepat waktu.

e. Kepatuhan Perpajakan

Rahayu dalam Satriani (2017), pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Nowak dalam Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Ilhamsyah dalam Niken Apriliana Susanti (2018) kepatuhan perpajakan adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku.

Ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsih dalam Sari & Neri Susanti, antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak
- 2) Kualitas Pelayanan
- 3) Tingkat pendidikan
- 4) Tingkat Penghasilan
- 5) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2017, hal.15) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam dokumen, ucapan dan tindakan responden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan teori Makmur (2011:7-9) terdapat delapan variabel yaitu: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai efektivitas penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1

Selatan dilihat dari unsur-unsur efektivitas oleh teori Makmur (2011:7-9), sudah efektif dari indikator ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Yang kurang efektif dari indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan sasaran. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari indikator ketepatan penentuan waktu disimpulkan kurang efektif karena tidak menentukan waktu sebelum diadakannya penertiban dan terkadang pada saat pelaksanaan melebihi 1x180 menit waktu yang telah ditentukan dalam SOP.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari indikator ketepatan perhitungan biaya sudah efektif karena telah digunakan sebagaimana mestinya untuk biaya honor mitra kerja.. Jumlah anggaran dana untuk kegiatan penertiban sebanyak kurang lebih 8 juta itu ditujukan untuk honor tenaga ahli atau mitra kerja

c. Ketepatan dalam Pengukuran

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektif karena belum ada aturan tertulis terkait jumlah pelaksanaannya setiap bulan, namun selama ini yang dijadikan acuan rutinitas pelaksanaan penertiban setiap bulannya 3 kali tapi terkadang tidak terlaksana karena hambatan kesiediaan mitra kerja dan terkadang

melebihi karena tidak ada aturan yang mengikat.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator ketepatan dalam menentukan pilihan sudah efektif karena telah memenuhi persyaratan kompetensi pelaksana sesuai dengan data dan observasi langsung yang dilakukan peneliti.

Pelaksana penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan telah memenuhi persyaratan pelaksana, dari segi pendidikan dapat dilihat dengan data yang ada, begitupun persyaratan yang lainnya yaitu dapat mengoperasikan komputer, memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan jenis pungutan pajak daerah, PNBP, dan SWDKLLJ/DPWKP, memiliki integritas, memiliki melayani sopan dan santun telah terpenuhi sesuai observasi peneliti di kantor SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan.

e. Ketepatan Berpikir

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pengawas internal SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan pada saat pelaksanaan penertiban jika ada permasalahan di lapangan dengan cara persuasif. dari indikator ketepatan berpikir dapat dikatakan sudah efektif karena dengan komunikasi secara langsung atau persuasif sehingga membuat wajib pajak lebih paham dan mengerti.

f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan dalam melakukan perintah sudah efektif, karena pimpinan mengontrol mulai persiapan hingga selesainya kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan saling bekerja sama antara pimpinan dengan pelaksana.pimpinan mengontrol mulai persiapan hingga selesainya kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan saling bekerja sama antara pimpinan dengan pelaksana.

g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Dari hasil penelitian ini bahwa indikator ketepatan dalam menentukan tujuan sudah efektif, karena dengan adanya kegiatan penertiban dapat menghasilkan pendapatan asli daerah sangat banyak berdasarkan realisasi hasil penertiban, namun terkait kesadaran wajib pajak belum tercapai.

Dengan adanya kegiatan penertiban dapat menghasilkan pendapatan asli daerah sangat banyak berdasarkan realisasi hasil penertiban, dan namun terkait meningkatnya kesadaran wajib pajak belum tercapai. Untuk tujuan menginventarisir kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak jalan sehingga memudahkan untuk mengklarifikasi dan mendata jenis kendaraan sesuai kendaraan layak pakai sehingga kendaraan dimaksud dapat diusulkan untuk dihapus sebagai Piutang Pajak Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini diambil alih oleh pihak kepolisian.

h. Ketepatan Sasaran

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator ketepatan sasaran dikategorikan

kurang efektif karena kesadaran wajib pajak masih kurang, dibuktikan dengan masih banyaknya terjaring penertiban.

Kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sifatnya mengingatkan kepada wajib pajak, tapi hal ini belum membuat wajib pajak sadar atas kewajibannya dapat dilihat dengan data yang masih banyaknya wajib pajak terjaring.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kepatuhan wajib pajak ada beberapa faktor yang menghambat sehingga wajib pajak terlambat yaitu: faktor keuangan, lupa dan tidak memperhatikan jatuh tempo pajak kendaraan. Sedangkan faktor yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan penertiban, dan sosialisasi.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan dilihat dari unsur-unsur efektivitas oleh teori Makmur (2011:7-9), sudah efektif dari indikator ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Yang kurang efektif dari indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan sasaran.
- 2) Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

yaitu: faktor keuangan, lupa, dan tidak memperhatikan jatuh tempo pajak kendaraan, sedangkan faktor yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan penertiban, dan sosialisasi.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Pihak SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sebaiknya dalam menentukan surat permintaan personil mitra kerja ditentukan jangka waktu pelaksanaan selama 1x180 menit serta menyampaikan setiap sebelum dilaksanakannya penertiban.
- 2) Pihak SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sebaiknya menentukan jumlah pelaksanaan penertiban setiap bulannya dalam SOP penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 3) Pihak SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sebaiknya membuat program kerja yang dapat mengingatkan wajib pajak setiap jatuh tempo pajak kendaraannya.
- 4) Pihak SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sebaiknya lebih meningkatkan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat bayar pajak kendaraannya.

8. Daftar Pustaka

Niken Apriliana Susanti. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Prof. Dr. Makmur, M. S. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* PT Refika Aditama

Reski Fatmala. (2019). *Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone.* Universitas Negeri Makassar.

Satriani. (2017). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.* Universitas Hasanuddin.

SK SOP Penertiban PKB UPT MKS 1, (2018)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.

Sony Devano, S.E., M.Ak., Ak & Siti Kurnia Rahayu, S.E., A. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu.* Fajar Interpretama Offset.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

- Vivi Yulian Sari & Neri Susanti.
(n.d.). Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Unit Pelayanan
Pendapatan Provinsi
Kabupaten Seluma. *Ekonomi*.
- Zulkardi. (2019). *Penertiban
Pedagang Kaki Lima (Studi
Kebijakan Pemerintah Kota
Banda Aceh dalam Menata
Kota)*. Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry.